**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia melakukan pengalihan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2014. Kecamatan Tanjung Harapan merupakan salah satu kecamatan di Kota Solok yang sudah mulai menerapkan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus melakukan persiapan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah itu sendiri. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT”.** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Tanjung Harapan.

Landasan normatif dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2014. Landasan teoritisnya yaitu optimalisasi, pemungutan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan telah melaksanakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan walaupun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan yaitu Sumber Daya Aparatur yang masih kurang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, data yang belum akurat dan masalah organisasi pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

***ABSTRACT***

*The Indonesian government to transfer the land and building tax implementation Rural and Urban from the Central Government to Local Government in 2014. The District of Tanjung Harapan is one of the districts in the Solok city already started to implement the policy as a follow-up of law Number 28 of 2009 on Local Taxes and Levies. For that Local Government must make arrangements to manage land and building tax Rural and Urban this as well as possible in order to provide benefits to the regional government itself. Therefore, the authors take the title* ***“OPTIMIZATION OF LAND AND BUILDING TAX COLLECTION RURAL AND URBAN CITY IN TANJUNG HARAPAN DISTRICT OF SOLOK CITY WEST SUMATERA”****. This study has the objective to find out how to optimize the collection of land and building tax in the District Rural and Urban Tanjung Harapan.*

*Normative cornerstone of this research is law Number 23 of 2014, Law Number 28 of 2009, the Local Regulation Number 6 of 2013 and Regulation of Mayor Number 14 of 2014. Mayor theoretical grounding that the optimization, the collection and Land and Building Tax Rural and Urban.*

*The method used in this study is a qualitative research method with descriptive techniques inductive approach. The technique of colleting data using interviews, observation and documentation. As well as data analysis techniques of data reduction, data display and conclusion.*

*The conclusion shows that the Government District of Tanjung Harapan has carried out optimization and Land Tax Building Rural and Urban although there are constraints faced by the Government of the District of Tanjung Harapan namely Apparatus Resources that are lacking both in terms of quality and quantity, the lack of public awareness in pay tax, data is not accurate and problem management organization and Building tax Rural Urban.*